

Penguatan Kapasitas Tata Kelola Keuangan BumDes Nekafmese melalui Pelatihan dan Pendampingan Berbasis Akuntabilitas dan Transparansi di Desa Oeltua, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Klaasvakumok J. Kamuri*¹, Janri D. Manafe², Tuti Setyorini³, Maria G. Y. Tallo⁴,
Wihelmina Muni⁵, Rohani P. Dima⁶, Noldy D. P. Mumu⁷, Petrus V. Baunsele⁸,
Plafianto J. Himpi⁹, Maxymilianus S. M. Kombong¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Kupang, Indonesia

*e-mail: klaasvakumok.kamuri@pnk.ac.id ¹

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekafmese di Desa Oeltua, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Keterbatasan kapasitas pengurus menyebabkan pelaporan keuangan tidak berjalan secara rutin dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat serta stagnasi aktivitas usaha BUMDes. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam tata kelola keuangan melalui pelaksanaan pelatihan dan pendampingan yang aplikatif. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan observasi awal, pelatihan terstruktur, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi. Pelatihan dilaksanakan secara modular dan simulatif, sedangkan pendampingan dilakukan secara intensif oleh tim dosen dan mahasiswa Project Based Learning (PBL) dalam penerapan langsung pencatatan dan pelaporan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan nyata pada mitra, berupa tersusunnya format laporan keuangan sederhana, meningkatnya konsistensi pencatatan transaksi, serta mulai diterapkannya pelaporan keuangan secara berkala. Kegiatan ini berdampak pada meningkatnya kemandirian pengurus dalam mengelola keuangan dan tumbuhnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Dengan demikian, pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan terbukti efektif sebagai strategi penguatan kapasitas dan keberlanjutan BUMDes.

Kata Kunci: Akuntabilitas, BUMDes, Pendampingan, Tata Kelola Keuangan, Transparansi

Abstract

The Village-Owned Enterprise (BUMDes) Nekafmese in Oeltua Village, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province, faces challenges in financial management, particularly regarding transaction recording, financial statement preparation, and the application of accountability and transparency principles. The limited capacity of the management causes financial reporting to not be done regularly, which impacts the decline in public trust and the stagnation of BUMDes business activities. This Community Service (PkM) activity aims to increase the capacity of BUMDes administrators in financial management through the implementation of practical training and mentoring. The activity implementation method is carried out through the stages of initial observation, structured training, continuous mentoring, and evaluation. The training is conducted modularly and through simulations, while intensive mentoring is provided by the team of lecturers and Project Based Learning (PBL) students for the direct application of financial recording and reporting. The results of the activity show a real change in the partners, including the development of a simple financial reporting format, increased consistency in transaction recording, and the initiation of regular financial reporting. This activity has resulted in increased independence for the management in managing finances and the restoration of community trust in BUMDes. Thus, financial management training and mentoring have proven effective as a strategy for strengthening the capacity and sustainability of BUMDes.

Keywords: Accountability, BUMDes, Capacity Building, Financial Governance, Transparency

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memegang posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui pengelolaan potensi lokal yang berbasis partisipasi masyarakat. Pembentukan BUMDes sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan tata kelola kelembagaan (Wahed et al., 2020). Dalam konteks tersebut, kemampuan BUMDes dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan usaha serta kepercayaan masyarakat desa.

Fenomena tersebut sejalan dengan kondisi BUMDes di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum. Laporan LP3M Universitas Nusa Cendana (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes di wilayah ini masih menghadapi keterbatasan kapasitas administratif dan manajerial, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan BUMDes belum mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara optimal, meskipun secara regulatif telah ditetapkan sebagai pilar utama tata kelola desa.

Kondisi tersebut tercermin pada BUMDes Nekafmese yang berlokasi di Desa Oeltua, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pengurus, BUMDes Nekafmese menghadapi berbagai permasalahan praktis dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan tersebut meliputi belum tersedianya format laporan keuangan yang baku, pencatatan transaksi yang belum konsisten, serta ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan. Situasi ini menyebabkan proses pelaporan tidak berjalan secara rutin dan sulit dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Permasalahan tata kelola keuangan tersebut diperparah oleh rendahnya literasi manajemen keuangan pengurus serta minimnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan yang relevan. Sebagian besar pengurus BUMDes belum pernah mengikuti pelatihan khusus terkait penyusunan laporan keuangan maupun penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kondisi ini berdampak pada melemahnya fungsi pengendalian internal serta terhambatnya pengambilan keputusan berbasis data, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja operasional BUMDes.

Rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan tersebut juga berkaitan dengan terbatasnya program penguatan kapasitas yang berkelanjutan bagi pengelola BUMDes. Hasil survei nasional dan data kelembagaan menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola BUMDes belum pernah mengikuti pelatihan formal terkait pengelolaan keuangan (Faizah et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa permasalahan BUMDes Nekafmese bukan semata persoalan regulasi, melainkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan praktik tata kelola keuangan secara operasional.

Kelemahan dalam sistem tata kelola keuangan memberikan implikasi signifikan terhadap keberlangsungan operasional BUMDes Nekafmese. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017, dengan mandat utama meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal demi kesejahteraan masyarakat, mengalami stagnasi operasional sejak akhir tahun 2024. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan potensi kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Apabila tata kelola BUMDes dipersepsikan tidak transparan dan tidak akuntabel, maka tingkat kepercayaan publik berpotensi menurun (Prianto, 2018). Tanpa intervensi yang terstruktur melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada peningkatan kapasitas manajemen keuangan, pengelola BUMDes Nekafmese akan menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menghambat proses pengembangan BUMDes serta melemahkan kontribusinya terhadap pembangunan desa. Keberhasilan BUMDes di Desa Panggungharjo, Yogyakarta, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata administrasi, kepemimpinan, serta dukungan sosial dan lingkungan (Prasetyanti & Kusuma, 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang sebagai upaya intervensi praktis untuk menjawab kebutuhan riil BUMDes Nekafmese. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam tata

kelola keuangan melalui pelaksanaan pelatihan terstruktur, pendampingan berkelanjutan, serta evaluasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat keberlanjutan ekonomi desa.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan solusi praktis bagi perbaikan sistem pengelolaan keuangan BUMDes Nekafmese, tetapi juga berfungsi sebagai wadah pembelajaran dan kontribusi akademik bagi mahasiswa dan masyarakat dalam mendukung penguatan perekonomian desa. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat desa, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sistem manajemen keuangan desa.

Dengan demikian, melalui pelaksanaan pelatihan yang terstruktur dan pendampingan berkelanjutan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini secara operasional bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes Nekafmese dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan, sebagai fondasi pemulihan kepercayaan publik dan penguatan keberlanjutan ekonomi desa. Model tata kelola keuangan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi BUMDes lain di Kabupaten Kupang dan wilayah sekitarnya (Wahed et al., 2020).

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di BUMDes Nekafmese, Desa Oeltua, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan sasaran utama pengurus BUMDes yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Metode pelaksanaan dirancang secara bertahap dan aplikatif untuk menjawab permasalahan nyata mitra, khususnya terkait rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas dan transparansi.

2.1. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahap pra-pelaksanaan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan riil mitra dan merancang kegiatan yang sesuai dengan kondisi BUMDes Nekafmese. Kegiatan pada tahap ini meliputi observasi awal dan diskusi bersama pengurus BUMDes serta perangkat desa melalui Metode utama yang digunakan pada tahap pra-pelaksanaan adalah *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan pendekatan diskusi terarah yang melibatkan kelompok kecil untuk mengeksplorasi isu, kebutuhan, serta rencana kegiatan secara mendalam, sehingga menghasilkan rekomendasi strategis bagi proses perencanaan tahap berikutnya (Waluyati, 2020).

Diskusi dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi dalam praktik pengelolaan keuangan, termasuk sistem pencatatan, pelaporan, serta kendala yang dihadapi pengurus dalam menjalankan tugas administrasi keuangan. Hasil identifikasi pada tahap ini menjadi dasar penyusunan materi pelatihan dan skema pendampingan yang bersifat kontekstual dan sesuai kebutuhan mitra.

2.2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan BUMDes yang bersifat terstruktur. Kegiatan pelatihan diikuti oleh pengurus inti BUMDes Nekafmese yang berjumlah 25 orang dan dilaksanakan dalam beberapa sesi selama periode kegiatan. Materi pelatihan difokuskan pada pemahaman prinsip akuntabilitas dan transparansi, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta pengenalan format pencatatan keuangan yang baku dan mudah diterapkan.

Metode pelatihan dilakukan secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi riil BUMDes Nekafmese. Peserta diberikan contoh kasus pengelolaan keuangan BUMDes untuk melatih kemampuan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Melalui pendekatan ini, pengurus BUMDes

diharapkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Setiap sesi pelatihan dilengkapi dengan diskusi dan tanya jawab untuk memberikan ruang bagi peserta menyampaikan kendala yang dihadapi serta memperoleh umpan balik langsung dari tim pengabdian. Pada akhir sesi pelatihan, dilakukan evaluasi pemahaman peserta melalui penugasan sederhana, seperti penyusunan contoh laporan keuangan berdasarkan transaksi yang terjadi di BUMDes.

Selain pelatihan, kegiatan ini dilengkapi dengan pendampingan berkelanjutan yang dilakukan oleh mahasiswa Program PBL (Project Based Learning) di bawah supervisi tim dosen. Pendampingan dilakukan secara langsung di Desa Oeltua selama periode September–Desember 2025. Pada tahap ini, mahasiswa prpgram *project based learning* (PBL) Imendampingi pengurus BUMDes dalam menerapkan materi pelatihan, khususnya dalam pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan keuangan, serta penerapan prosedur pengelolaan keuangan yang lebih tertib.

Pendampingan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pengurus BUMDes dalam setiap proses, sehingga mitra tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi berperan aktif sebagai subjek dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Melalui pendampingan ini, diharapkan terjadi proses pembelajaran berkelanjutan yang mampu meningkatkan kemandirian pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan.

2.3. Tahap Pasca Pelaksanaan

Tahap penutup dari rangkaian kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (M&E) terhadap keseluruhan program. M&E menjadi elemen krusial untuk menjamin keberhasilan sekaligus keberlanjutan pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan (Dangoran et al., 2023). Melalui pendekatan M&E yang sistematis dan partisipatif, tim pelaksana dapat menilai efektivitas program, mengidentifikasi dampak yang dihasilkan, serta memastikan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan BUMDes Nekafmese secara berkelanjutan. Tahap ini juga menjadi dasar bagi pengembangan program pendampingan lanjutan di masa depan.

Evaluasi dilakukan melalui pemantauan terhadap kemampuan pengurus BUMDes dalam menyusun laporan keuangan, konsistensi pencatatan transaksi, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi tersusunnya format laporan keuangan BUMDes, meningkatnya frekuensi dan keteraturan pelaporan keuangan, serta meningkatnya pemahaman dan kemandirian pengurus dalam mengelola keuangan tanpa pendampingan intensif.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan rekomendasi tindak lanjut bagi BUMDes Nekafmese agar praktik pengelolaan keuangan yang telah diperkenalkan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, metode pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga pada keberlanjutan dampak bagi penguatan tata kelola keuangan BUMDes.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada BUMDes Nekafmese menghasilkan sejumlah perubahan nyata dalam praktik pengelolaan keuangan, khususnya pada aspek pencatatan, pelaporan, dan pemahaman pengurus terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hasil kegiatan ini tidak hanya tercermin dari dokumentasi pelaksanaan, tetapi juga dari perubahan perilaku dan praktik kerja pengurus BUMDes setelah mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan.

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, pengelolaan keuangan BUMDes Nekafmese masih dilakukan secara sederhana dan belum terstandar. Pencatatan transaksi tidak dilakukan secara rutin, laporan keuangan belum tersusun dalam format baku, serta belum terdapat

pembagian tugas yang jelas terkait pengelolaan administrasi keuangan. Kondisi ini menyebabkan pengurus mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat desa secara transparan.

Selain itu, aktivitas rapat evaluasi keuangan belum dilakukan secara berkala, sehingga pengambilan keputusan usaha cenderung tidak berbasis pada data keuangan yang terdokumentasi dengan baik. Situasi tersebut memperkuat temuan awal bahwa permasalahan utama BUMDes Nekafmese terletak pada keterbatasan kapasitas pengurus dalam menerapkan tata kelola keuangan secara operasional.



Gambar 1. Sesi FGD Tim Pelaksana, Perangkat Desa Oeltua & Pengurus BUMDes Nekafmese

Pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pengurus BUMDes. Pengurus mulai memahami pentingnya pencatatan transaksi secara konsisten, penggunaan format laporan keuangan sederhana, serta prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes. Hasil evaluasi sederhana yang dilakukan pada akhir sesi pelatihan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menyusun contoh laporan keuangan berdasarkan transaksi yang diberikan.

Dokumentasi kegiatan pelatihan menunjukkan adanya keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan studi kasus yang disimulasikan sesuai dengan kondisi BUMDes Nekafmese. Aktivitas ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan keterampilan praktis pengurus, bukan hanya pemahaman konseptual. Dengan demikian, pelatihan berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan sekaligus penguatan kapasitas teknis pengurus BUMDes.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa intervensi melalui pelatihan dan pendampingan memberikan dampak nyata terhadap tata kelola keuangan BUMDes Nekafmese. Indikator keberhasilan kegiatan terlihat dari tersusunnya format laporan keuangan sederhana, meningkatnya frekuensi pencatatan dan pelaporan keuangan, serta adanya komitmen pengurus untuk melaksanakan rapat evaluasi keuangan secara berkala. Dampak lain yang teridentifikasi adalah meningkatnya kesadaran pengurus terhadap pentingnya transparansi sebagai dasar membangun kembali kepercayaan masyarakat desa.

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi mulai diimplementasikan dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan praktik pengelolaan BUMDes yang berhasil di beberapa daerah, di mana peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memperbaiki kinerja kelembagaan.



Gambar 3. Rapat Evaluasi Pasca Program Bersama Penrangkat Desa Oeltua, Pengurus BUMDes Nekafmese & Mahasiswa PBL

Hasil – hasil kegiatan sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menegaskan peran akuntabilitas publik (Bovens, 2007) serta urgensi penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Ebrahim, 2019). Secara umum, pelaksanaan PkM ini membuktikan bahwa pendekatan intervensi berbasis komunitas mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di tingkat lokal sekaligus menumbuhkan budaya akuntabilitas publik yang lebih kuat.

3.2. Pembahasan

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengurus BUMDes melalui pelatihan dan pendampingan yang aplikatif mampu mendorong perubahan nyata dalam praktik pengelolaan keuangan. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak lagi berhenti pada tataran normatif, tetapi mulai terwujud dalam bentuk pencatatan transaksi yang lebih tertib, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta peningkatan kesadaran pengurus terhadap pentingnya pelaporan keuangan secara berkala. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa (Wahed et al., 2020).

Perubahan praktik yang terjadi pada BUMDes Nekafmese sejalan dengan temuan Prianto (2018) yang menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga desa. Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, keterbatasan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan menyebabkan lemahnya kepercayaan masyarakat serta stagnasi aktivitas usaha BUMDes. Setelah intervensi dilakukan, pengurus mulai menyadari bahwa keterbukaan informasi keuangan dan keteraturan

administrasi merupakan prasyarat penting untuk memulihkan legitimasi sosial BUMDes di mata masyarakat desa.

Pendekatan pelatihan yang dikombinasikan dengan pendampingan berkelanjutan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis pengurus BUMDes. Proses pembelajaran yang berlangsung tidak hanya bersifat satu arah, tetapi melibatkan pengalaman langsung melalui praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Pola ini mencerminkan prinsip pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), di mana peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas nyata (Kolb, 1984). Dalam konteks pengabdian ini, pengalaman langsung pengurus dalam mengelola keuangan BUMDes menjadi faktor kunci keberhasilan transfer pengetahuan.

Hasil pendampingan juga menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas pengelola BUMDes bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan oleh minimnya akses terhadap pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Faizah et al. (2023) yang menyatakan bahwa sebagian besar pengelola BUMDes di Indonesia belum pernah mengikuti pelatihan formal pengelolaan keuangan, sehingga mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip tata kelola secara operasional. Oleh karena itu, pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan ini berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Lebih lanjut, perubahan positif yang mulai terlihat pada BUMDes Nekafmese memperkuat temuan Prasetyanti dan Kusuma (2020) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, tata administrasi yang tertib, serta dukungan lingkungan sosial. Dalam konteks ini, penguatan tata kelola keuangan menjadi pintu masuk strategis untuk memperbaiki kinerja kelembagaan secara keseluruhan. Meskipun perubahan yang terjadi masih berada pada tahap awal, hasil kegiatan ini telah meletakkan fondasi penting bagi penguatan kelembagaan BUMDes dan keberlanjutan usaha desa di masa mendatang.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang secara kontekstual dan berbasis kebutuhan mitra mampu menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola BUMDes. Integrasi antara pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab permasalahan pengelolaan keuangan BUMDes, sekaligus memperkuat peran BUMDes sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi perdesaan.

Keberhasilan penerapan model ini sekaligus memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dukungan kebijakan melalui bantuan teknis, pelatihan manajerial, hingga pemberian skema insentif. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh tingkat kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, konsistensi penerapan model pembangunan ekonomi lokal berkontribusi pada peningkatan transparansi, optimalisasi tata kelola keuangan, serta penguatan kapasitas organisasi desa. Dampak tersebut berpotensi menghasilkan ekosistem pembangunan ekonomi perdesaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memiliki manfaat sosial yang lebih luas.

3.3. Keterbatasan Analisis Hasil

Keterbatasan data kuantitatif, seperti perubahan pendapatan, tingkat pengembalian investasi (ROI), serta skor *pre-post* evaluasi, menyebabkan kesimpulan dari analisis bersifat sementara dan lebih bergantung pada observasi maupun kerangka teoritis, sehingga dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas temuan. Evaluasi keberhasilan BUMDes yang hanya berbasis data kualitatif memberikan gambaran umum mengenai tata kelola dan operasional, namun tidak cukup untuk menyimpulkan dampak ekonomi jangka panjang tanpa dukungan data kuantitatif. Oleh karena itu, kesimpulan tersebut perlu diverifikasi kembali saat data yang lebih lengkap tersedia (Damschroder et al., 2009).

Selain itu, model analisis PkM yang digunakan belum sepenuhnya mempertimbangkan variabel eksternal, seperti kondisi pasar lokal, kebijakan fiskal desa, maupun perubahan regulasi pemerintah, yang secara langsung dapat memengaruhi pendapatan dan keberlanjutan BUMDes.

Keterbatasan ini menekankan pentingnya perancangan strategi evaluasi yang lebih matang di masa mendatang, misalnya melalui pengumpulan data berkala dan kolaborasi dengan pemerintah desa maupun lembaga penelitian untuk memperoleh informasi yang lebih valid dan komprehensif.

Meski demikian, keterbatasan dalam analisis tidak mengurangi nilai kegiatan PkM yang telah dilakukan. Sebaliknya, hal ini menjadi titik awal bagi pengembangan riset lebih mendalam dan evaluasi lanjutan, sehingga pemahaman terhadap dampak ekonomi jangka panjang BUMDes dapat diperkuat melalui pengumpulan data dan evaluasi yang berkesinambungan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan pada BUMDes Nekafmese, Desa Oeltua, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berhasil mencapai tujuan utama kegiatan, yaitu meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam pengelolaan keuangan berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi. Melalui rangkaian pelatihan terstruktur dan pendampingan berkelanjutan, pengurus BUMDes memperoleh pemahaman dan keterampilan praktis dalam melakukan pencatatan transaksi, menyusun laporan keuangan sederhana, serta menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan yang dihasilkan dari kegiatan ini tercermin pada perbaikan praktik pengelolaan keuangan, meningkatnya konsistensi pencatatan dan pelaporan, serta tumbuhnya kesadaran pengurus terhadap pentingnya transparansi sebagai dasar membangun kepercayaan masyarakat desa. Meskipun perubahan tersebut masih berada pada tahap awal, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang dikombinasikan dengan pendampingan aplikatif mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini menegaskan bahwa intervensi berbasis kebutuhan mitra dan berorientasi pada praktik lapangan merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa. Penguatan tata kelola keuangan BUMDes tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja internal lembaga, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan usaha desa dan penguatan peran BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi perdesaan.

Hasil kegiatan ini memberikan implikasi bahwa program pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga konsistensi praktik tata kelola yang telah dibangun. Model kegiatan yang diterapkan dalam PkM ini juga berpotensi direplikasi pada BUMDes lain dengan karakteristik serupa sebagai upaya penguatan kelembagaan ekonomi desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh hormat, kami menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Oeltua dan Pengurus BUMDes Nekafmese atas dukungan, kerja sama, dan keterbukaan yang diberikan sepanjang pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini.

Partisipasi aktif, penyediaan data, serta komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes merupakan elemen kunci yang memungkinkan rangkaian kegiatan—mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan pelatihan, hingga proses evaluasi, dapat berjalan dengan lancar dan produktif.

Kami sangat menghargai kesempatan kolaborasi yang telah diberikan, khususnya ruang bagi tim dosen dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran bersama masyarakat dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan desa. Semoga kerja sama ini dapat terus dilanjutkan dan menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja BUMDes Nekafmese serta pembangunan Desa Oeltua yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Bovens, M., Schillemans, T., & 't Hart, P. (2008). Does public accountability work? An assessment tool. *Public Administration*, 86(1), 225–242.
- Chambers, R. (2017). Participatory workshops and bottom-up development: reflections on appropriate technology and methodological flexibility. In C. Dolgon, T. D. Mitchell & T. K. Eatman (Eds.), *The Cambridge Handbook of Service Learning and Community Engagement* (pp. 125–238). Cambridge University Press.
- Damschroder, L. J., Aron, D. C., Keith, R. E., Kirsh, S. R., Alexander, J. A., & Lowery, J. C. (2009). Fostering implementation of health services research findings into practice: A consolidated framework for advancing implementation science. *Implementation Science*, 4, 50.
- Ebrahim, A. (2019). Accountability in practice: A conceptual, institutional, and empirical exploration.
- Ebrahim, A., & Weisband, E. (2007). Global accountability: Participation, pluralism and publicity.
- Ericsson, K. A. (2008). Deliberate practice and the acquisition and maintenance of expert performance. In K. A. Ericsson et al. (Eds.), *The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance*. Cambridge University Press.
- Faizah, E. N., Hakim, A. L., Basyah, M. A., Aini, N., & Hasan, F. R. (2023). *Pelatihan manajemen keuangan bagi pengelola BUMDes di Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13370–13374.
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Prasetyanti, A., & Kusuma, B. (2020). Studi kasus transformasi organisasi BUMDes: perspektif institutional change.
- Pratama, D., & Wicaksono, F. (2021). Good governance di level desa: tantangan budaya dan akuntabilitas.
- Prianto, R. (2018). Kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan BUMDes: analisis partisipatif.
- Wahed, A., dkk. (2020). Kapasitas administratif dan kinerja BUMDes di daerah tertinggal.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). SAGE Publications.

Halaman Ini Dikосongkan